

BAB III

ANALISIS *BUREAUCRATIC MODEL* DALAM KEPUTUSAN JEPANG MEMPERTAHANKAN NEGOSIASI CPTPP 2017-2018

Bab ini membahas mengenai analisis sikap Jepang yang tetap mempertahankan negosiasi “*Comprehensive and Progressive for Trans-Pacific Partnership*” (CPTPP) meski Amerika Serikat sebagai pemimpin dan mitra dagang utama keluar dari perjanjian pada tahun 2017. Dalam rangka menjabarkan analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan *Bureaucratic Model* sebagai alat analisis. Dalam teori *Bureaucratic Model* terdapat dua hal yang menjadi komponen analisis utama. Dua komponen dalam pendekatan *Bureaucratic Model* tersebut dijadikan sub-bab dalam bab ini. Adapun dua hal tersebut adalah, *Pertama* Identifikasi Model Birokratik, dalam tahap ini menjabarkan mengenai tujuh hal yang terjadi dalam pembentukan sebuah keputusan yaitu *pemain-pemain dalam posisi; prioritas, persepsi dan isu; kepentingan, pertaruhan dan kekuatan; masalah-masalah; saluran tindakan; tindakan sebagai politik; aliran sebagai hasil*. Pada implementasinya, identifikasi dilakukan dalam kasus Jepang mempertahankan CPTPP paska keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian perdagangan bebas tersebut; *Kedua* Analisis Model Birokratik, terdapat tiga komponen analisis utama setelah identifikasi yaitu, *Aksi dan Niatan; Posisi (where you stand depend on where you sit); Chief dan Indians*.

3.1 Identifikasi Model Birokratik

Pembahasan sebelumnya menerangkan mengenai konsep *bureaucratic model* sebagai alat analisis keputusan Jepang dalam mempertahankan negosiasi CPTPP. Dari penjelasan sebelumnya juga diperlukan identifikasi terlebih dahulu mengenai tujuh hal sebelum membahas mengenai analisis utama. Identifikasi tujuh hal ini disebut oleh Alisson sebagai “*organizing concept*”, dengan demikian bab ini membahas identifikasi ketujuh komponen tersebut. *Pertama*, menjelaskan mengenai posisi pemain dalam pengambilan kebijakan; *Kedua*, menjelaskan tentang prioritas terbatas, persepsi dan isu-isu dari pemain-pemain yang terlibat; *Ketiga*, menerangkan kepentingan, pertaruhan serta kekuatan yang dimiliki oleh pemain-pemain; *Keempat*, masalah-masalah yang dihadapi oleh pemain-pemain; *Kelima*, saluran yang dipilih pemain untuk bertindak; *Keenam*, tindakan politik yang diambil oleh pemain-pemain yang terlibat dalam pengambilan keputusan; dan terakhir *Ketujuh*, arus sebagai hasil, yaitu hasil keluaran dari kompromi pemain-pemain yang terlibat.

3.1.1 Pemain-pemain dalam posisi.

Menurut Alisson, pemain-pemain yang dimaksud adalah individu, bukan negara atau konglomerat. Selanjutnya Alisson menerangkan bahwa pemain-pemain merupakan orang yang mengisi jabatan dalam pemerintahan;

“Groups of these players constitute the agent for particular government decisions and actions. Players are men in jobs.” (Allison, 1969).

Dalam penjelasannya, Alisson juga membagi pemain berdasarkan tiga kategori, yaitu *Chief*, *Staff* dan *Indians*, juga mencontohkan siapa saja pemain yang termasuk dalam ketiga kategori tersebut;

“U.S. government the players include “Chiefs”:the President, Secretaries of State, Defense, and Treasury, Director of the CIA, Joint Chiefs of Staff, and, since 1961, the Special Assistant for National Security Affairs ; 80 “Staffers” : the immediate Staff of each Chief; “Indians”: the political appointees and permanent government officials within each of the departments and agencies ; and “Ad Hoc Players” : actors in the wider government game (especially Congressional Influentials”), members of the press, spokesmen for important interest groups (especially the “bipartisan foreign policy establishment? in and out of Congress), and surrogates for each of these groups. Other members of the Congress, press, interest groups, and public form concentric circles around” (Allison, 1969, p. 709)

Dengan kutipan di atas, maka telah dicontohkan siapa saja yang tergolong dalam tiga jenis pemain yang terlibat dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri. Keputusan Jepang dalam mempertahankan negosiasi CPTPP juga ditentukan oleh pemain-pemain yang ada. Dalam konteks ini maka pemain-pemain tersebut adalah sebagai berikut; *Pertama, Chief* merupakan pemain yang memiliki posisi pengambilan keputusan tertinggi baik dalam pemerintahan seperti Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, ataupun menteri-menteri yang mengetuai satu kementerian seperti Taro Aso, yang terkait dengan masalah ekonomi, perdagangan dan hubungan luar negeri. Pada tabel 1 dapat dilihat *Chief* yang terlibat; *Kedua, Staffers*, yaitu *Staff* yang dimiliki oleh masing-masing *Chief*, baik itu perdana menteri maupun menteri-menteri, pada tabel 2 dapat dilihat *Staffers* yang terlibat dalam pengambilan kebijakan; *Ketiga, Indians* merupakan jabatan politik yang merupakan posisi mewakili pemerintahan ataupun departemen resmi negara. Pada tabel 3 dapat dilihat *Indians* yang terlibat dalam pengambilan kebijakan.

Tabel 3.1		
Pemain-pemain <i>Chief</i>		
No.	Chief	Jabatan
1.	Shinzo Abe (Perdana Menteri)	Perdana menteri
2.	Taro Aso (Wakil PM, Menteri Keuangan)	Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan
3.	Taro Kono (Menteri Luar Negeri)	Menteri Luar Negeri
4.	Hiroshegi (Menteri Ekonomi, dan Perindustrian) Shiko	Menteri Ekonomi dan Perindustrian
5.	Yoshihide (Sekretaris Kabinet) Suga	Sekretaris Kabinet
6.	Toshimitsu (Menteri Ekonomi dan Kebijakan Fiskal, Menteri TPP dan Negosiasi Perdagangan Jepang-AS) Motegi	Menteri Ekonomi dan Kebijakan Fiskal, Menteri Negosiasi TPP dan Negosiasi Perdagangan AS-Jepang
Sumber : (Kantei.go.id, 2018)		

Tabel 3.2		
Pemain-pemain <i>Staffers</i>		
No.	Nama	Jabatan
1.	Yamagami Shingo	Direktur Jenderal Biro Hubungan Ekonomi
2.	Okochi Akihiro	Direktur Biro Kerjasama Ekonomi
3.	Katahira Satoshi	Direktur Divisi Perjanjian Ekonomi
4.	Nanazawa Jun	Asisten Eksekutif Menteri Luar Negeri Jepang
Sumber : (Mofa Japan, 2019)		

Tabel 3.3		
Pemain-pemain <i>Indians</i>		
No.	Nama	Jabatan
1.	Takehiro Kagawa	Duta Besar untuk Hubungan Ekonomi Internasional
2.	Kazuyoshi Umemoto	Ketua Negosiator Jepang untuk TPP, Duta Besar untuk Hubungan Ekonomi Internasional
Sumber : (Miyazaki, 2018)		

Tabel 3.4		
Pemain-pemain Kelompok Kepentingan		
No.	Nama Pemain	Keterangan
1.	Keidanren	Federasi Pebisnis Jepang
2.	Nokyo	Organisasi Koperasi Pertanian Jepang
3.	Asosiasi Petani Susu dan Daging Babi	-
4.	Asosiasi Manufaktur Mobil	-
5.	Asosiasi Industri Elektornik, Teknologi dan Informasi	-
Sumber : (Davis, 2018, pp. 6-19)		

Disamping tiga jenis pemain yang terlibat juga terdapat pemain lain yang berada di luar pemerintahan. Hal ini disebut oleh Alisson sebagai “*interest group*” atau kelompok kepentingan. Dalam penentuan kebijakan Jepang mempertahankan negosiasi CPTPP. Pada tabel 4 merupakan pemain-pemain yang tergabung dalam kelompok kepentingan.

Dalam tabel-tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat empat jenis pemain yang terlibat dalam pembuatan keputusan Jepang tetap mempertahankan TPP. Empat jenis kelompok tersebut adalah; *Chiefs, Staffs, Indians* dan *Kelompok Kepentingan*. *Pertama, Chiefs*, dalam kategori ini terdapat enam petinggi eksekutif dalam kabinet koalisi Partai Demokratik Liberal dan Partai Komeito. Keenam petinggi eksekutif tersebut berpartisipasi langsung dalam negosiasi TPP, bahkan terdapat menteri yang focus dalam mengurus masalah negosiasi TPP. *Kedua, Staffs*, dalam golongan ini merupakan asisten dari kementerian terkait TPP, sehingga juga terlibat dalam pembahasan negosiasi TPP. *Ketiga, Indians*, merupakan utusan langsung Jepang yang langsung terlibat dalam TPP. *Keempat*, kelompok kepentingan yang terdiri dari beberapa asosiasi. Dalam TPP terdapat pengaturan masalah-masalah seperti perdagangan dalam bidang industri teknologi dan pertanian. Sehingga memasukan kelompok kepentingan dalam tabel 3.4 tepat karena mewakili suara-suara kelompok yang kepentingannya akan diatur dalam TPP. Pemilihan terhadap keempat jenis pemain-pemain yang terdapat dalam empat tabel didasarkan pada keterlibatan langsung pihak-pihak tersebut dalam TPP, atau merupakan pihak yang secara langsung terdampak dalam TPP seperti kelompok kepentingan.

Dalam hal ini juga terdapat kepentingan-kepentingan yang dianut oleh keempat pemain. *Pertama Chief*, pada hal ini merupakan *Shinzo Abe, Taro Aso, Taro Kono, Hiroshige Shiko, Yoshihide Yuga, Toshimitsu Motegi*. Dalam hal ini kepentingan Chief adalah untuk melindungi kepentingan nasional Jepang, serta merumuskan kebijakan politik ekonomi yang menguntungkan bagi Jepang (Mulgan, 2016, p. 01). *Kedua, Staff* yang merupakan sekretaris daripada *Chieff, Yamagami Shingo, Okochi Akhihiro, Katahira Satoshi, Nanazawa Jun* (lihat tabel 3.2). Dalam hal ini merupakan menteri-menteri Shinzo Abe. Staff juga memiliki kepentingan yang sama sesuai dengan *Chieff*, hal ini mengacu pada sistem politik demokrasi parlementer Jepang yang bersifat sentralistik. Sehingga memperjuangkan kepentingan yang sama yaitu kepentingan nasional Jepang. *Ketiga, Indians* adalah utusan resmi Jepang yang menangani perundingan TPP *Takehiro Kagawa, Kazuyoshi Umemoto* (lihat tabel 3.3). Pada hal ini, utusan resmi Jepang dalam negosiasi juga memiliki kepentingan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan nasional Jepang. Serta mengikuti arahan dari pemerintah pusat. *Keempat kelompok Kepentingan* adalah *Keindanren, Nokyō, Asosiasi Industri Elektornik, Teknologi dan Informasi, Asosiasi Manufaktur Mobil, Asosiasi Petani Susu dan Daging Babi*. Dalam hal ini terdapat dua pemain yang memiliki suara signifikan terhadap isu negosiasi CPTPP yaitu *Keindanren* dan *Nokyō*. Dalam hal ini kepentingan *Keindanren* sebagai asosiasi pengusaha Jepang adalah mendorong kemajuan ekonomi dan usaha Jepang, dalam hal ini sektor swasta (Keindanren, n.d.). Sementara kepentingan *Nokyō* sebagai asosiasi kelompok petani Jepang adalah untuk melindungi produk pertanian Jepang dari pasar bebas (Harner, 2011).

Keempat pemain diatas memiliki pola interaksi yang dinamis, meskipun demikian terdapat dua jenis interaksi yang terjadi. *Pertama*, interaksi *Chief*, *Staff* dan *Indians* dalam hal ini mengacu sistem politik demokrasi parlementer Jepang, maka ketiga pemain diatas memiliki kordinasi yang searah dan tersentralistik (Kobayashi, 1988, p. 16). Dalam hal ini Perdana Menteri Shinzo Abe dapat menginstruksikan perintah kepada menteri-menteri (*Staff*), utusan resmi Jepang (*Indians*). Sementara itu menteri-menteri dan utusan resmi dapat berkonsultasi dengan Perdana Menteri. *Kedua*, interaksi kelompok kepentingan *Keindanren* dan *Nokyo* dengan *Chief*, *Staff* dan *Indians*. Dalam hal ini kelompok kepentingan dapat menyalurkan suaranya kepada *Chief* baik itu perdana menteri maupun menteri, serta sekretaris dari para menteri. Diadakannya pertemuan, konsultasi seperti yang dilakukan oleh *Keindanren* dengan Perdana Menteri merupakan contoh simana interaksi tersebut terjadi. Sementara itu terhadap *Indians*, kelompok langsung tidak dapat melakukan kontak secara langsung, mengingat *Indians* hanya mengikuti perintah dari *Chieff* (Kantei.go.id, 2017).

3.1.2 Prioritas, Persepsi dan Isu.

Berdasarkan penjelasan Alisson, posisi pemain-pemain yang terlibat dalam pengambilan kebijakan dalam membentuk prioritas, persepsi dan isu dipengaruhi oleh orientasi organisasi dan departemen yang diduduki. Dalam penjelasan sebelumnya terdapat empat jenis pemain yang terlibat yaitu *Chief*, *Staffers*, *Indians* dan Kelompok kepentingan (Allison, 1969). Masing-masing dari berkemungkinan besar memiliki persepsi, prioritas isu masing-masing.

Dalam pihak *Chief, Staffers* dan *Indians* mengikuti perintah Perdana Menteri Shinzo Abe. Hal ini disebabkan sistem politik Jepang yang sangat sentralistik dalam figur kepemimpinan dari partai berkuasa yaitu Partai Liberal Demokratik (LDP) dibawah kepemimpinan Shinzo Abe. Sehingga tidak terdapat dinamika yang besar dalam perbedaan prioritas. Perdana Menteri Shinzo Abe sangat berperan penting dalam keputusan Jepang dalam mempertahankan negosiasi CPTPP. Dalam pidato dalam pembentangan kebijakan di parlemen “193rd Session of the Diet 2017” pada 20 Januari. Shinzo Abe menerangkan prioritas kebijakannya yang menyebut “ Aliansi Amerika Serikat-Jepang” sebagai hal pertama yang diutarakan dalam sesi pembentangan kebijakan tersebut.

“The Japan-U.S. Alliance has, is, and will continue to be, the cornerstone of Japan’s diplomacy and security policies. This is an unchanging principle. I intend to travel to the United States at the earliest possible opportunity to meet with President Trump to further strengthen the bonds of our alliance” (Kantei.go.id, 2017).

Dalam sesi tersebut, Shinzo Abe juga menekankan pada pentingnya adanya sistem ekonomi yang adil di abad 21. Dengan demikian TPP merupakan salah satu cara untuk mencapainya, bahkan Shinzo Abe mengatakan ini sebagai “*cornerstone of future economic partnerships*”.

“...We will, as the standard-bearers of free trade, build a 21st century economic system based on fair rules.

The TPP Agreement sets the standard for this, and will be a cornerstone of future economic partnerships” (Kantei.go.id, 2017).

Aliansi strategis dengan Amerika Serikat serta penguatan kerjasama ekonomi menunjukkan bahwa terdapat prioritas kuat dari Shinzo Abe dalam kebijakan ekonomi dan strategis keamanan. Prioritas Shinzo Abe juga pada perkembangan ekonomi domestik, dimana pada tahun 2017 mendapat kritik tajam terhadap kinerja ekonomi Shinzo Abe dalam bidang ekonomi yang dipangang

kurang efektif (Andri, 2017). Pergantian kabinet pun dilakukan dalam rangka memperbaiki ekonomi. Perdana Menteri Shinzo Abe juga menyatakan bahwa;

“Perekonomian akan menjadi prioritas kami. Sebab kami ingin agar tren deflasi segera berakhir. Menteri Ekonomi Toshimitsu Motegi akan mengawasi upaya reformasi struktural kami” (Andri, 2017).

Dengan demikian diketahui bahwa prioritas Shinzo Abe adalah aliansi strategis dengan Amerika Serikat dan perbaikan kondisi ekonomi Jepang. Adanya prioritas dalam dua hal tersebut dipengaruhi oleh adanya persepsi yang dipegang oleh Perdana Menteri Shinzo Abe. Secara historis, Jepang dibawah LDP memiliki hubungan yang erat dengan Amerika Serikat sejak tahun 1960-an. Kedekatan Amerika Serikat dan partai Liberal Demokratik (LDP) di dorong kekhawatiran akan meningkatnya pengaruh kaum kiri pada pemilihan umum di Jepang yaitu Partai Sosial Jepang dan Partai Komunis Jepang. Sehingga sepanjang pemilihan umum Jepang dari tahun 1960-an hingga 1970-an, partai Liberal Demokratik secara konsisten mendapat bantuan dari Amerika Serikat dalam bidang pendanaan (LDP) (Weiner, 1994). Dengan hubungan historis yang dekat dengan Amerika Serikat, tentu membuat Perdana Menteri Shinzo Abe ingin kembali mengeratkan aliansi dua antara Jepang dan Amerika Serikat. Disamping itu prioritas lain adalah perbaikan ekonomi Jepang, dalam studi kasus penelitian ini diketahui bahwa perdagangan bebas digunakan sebagai mekanisme untuk memperbaiki kondisi ekonomi Jepang. Hal ini tentu dipengaruhi oleh kepemimpinan Shinzo Abe. Sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pada 2012, Shinzo Abe telah menjanjikan perbaikan ekonomi dengan strategi “*Abenomics*”. Penggunaan strategi ekonomi tersebut telah dinilai berhasil menangani beberapa masalah ekonomi Jepang seperti misal pasar bursa saham Jepang mengungguli performa

Uni Eropa dalam hal “*total dollar returns*” (Tasker, 2018). Dengan demikian diketahui bahwa prioritas dalam peningkatan performa ekonomi dipengaruhi oleh sosok Shinzo Abe dan partai Liberal Demokratik (LDP). Sementara itu dalam “*Issues*” (isu) maka seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya adalah adanya meluasnya pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik melalui beberapa program geopolitik, geostrategis dan geoekonomi seperti program “*One Belt One Road*” serta manuver militer Tiongkok di laut Tiongkok Selatan. Yang mana hal-hal tersebut meliputi sektor ekonomi dan keamanan Tiongkok di kawasan. Hal-hal tersebut juga menempatkan posisi Jepang semakin terpojok dalam politik Internasional. Maka tidak salah apabila Jepang dibawah Shinzo Abe pada akhirnya memilih untuk memprioritaskan kebijakan terutama TPP untuk sektor ekonomi dan strategis keamanan.

Disamping itu, pemain yang terlibat lain adalah *kelompok kepentingan*, dalam hal ini prioritas utama dari masing-masing kelompok kepentingan adalah memperjuangkan kepentingan kelompok masing-masing. Dengan demikian terdapat perbedaan prioritas antara kelompok satu dengan lainnya, sesuai dengan kepentingan bisnis masing-masing. Adapun persepsi juga terdapat beragam antar kelompok kepentingan, Keidanren sebagai asosiasi pengusaha Jepang menilai adanya TPP-11 akan meningkatkan dan menguntungkan sektor perdagangan Jepang. Keidanren memprediksikan dengan adanya TPP, pertumbuhan ekonomi Jepang meningkat 2.7%, serta ekspor akan bertambah sekitar USD 23.2 milyar (Keidanren, 2017).

Nokyo sebagai asosiasi pertanian menilai TPP-11 hanya akan merugikan Jepang, karena adanya TPP akan mengizinkan adanya arus masuk produk

pertanian luar yang tentu lebih murah dari hasil petani Jepang. Dalam hal ini TPP akan berdampak pada naiknya impor sektor pertanian Jepang, diantaranya daging sapi meningkat 31% dengan nilai USD 1 milyar per tahun, beras meningkat 111%, USD 570 per tahun, gandum 14% dengan nilai USD340 juta per tahun, mentega naik 52%, susu krim bubuk 41%, keju 5%, daging babi 3% (Korves, 2014).

Adapun isu-isu yang muncul berkaitan dengan kepentingan dan tujuan masing-masing dari organisasi atau asosiasi. Kelompok pertanian menganggap bahwa TPP akan membawa kerugian bagi mereka. Sementara kelompok pengusaha terutama industri automobile menganggap TPP justru membawa keuntungan. Perbedaan sikap yang ada merujuk pada sektor yang mereka tekuni, dimana sektor pertanian lebih terimbas secara signifikan. Sementara sektor industri dan teknologi justru dinilai akan terdongrak dengan besar apabila TPP-11 disepakati.

3.1.3 Kepentingan, Pertaruhan dan Kekuatan

Setiap pemain memiliki kepentingan, pertaruhan, kedua hal tersebut ditentukan oleh “*power*” atau kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing pemain. Sehingga kekuatan pemain menentukan pengaruh yang akan diberikan terhadap pengambilan keputusan (Allison, 1969).

Dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat kepentingan-kepentingan dalam pengambilan keputusan. Adapun dua kepentingan bersama adalah, yaitu kepentingan dari a.) (*Chieff, Staff dan Indians*) dan b.) *kelompok kepentingan*.

Pertama, Kepentingan, Pertaruhan dan Kekuatan bagi Chief, Staff dan Indians adalah sama, karena mereka berada dalam satu garis kordinasi. Terdapat dua kepentingan yang mendorong Jepang tetap mempertahankan negosiasi CPTPP. a.) ekonomi atau keuntungan bagi perekonomian Jepang, Dengan bergabung dengan CTPP maka diprediksi akan mendorong pertumbuhan ekonomi Jepang, dimana Produk Domestik Bruto (PDB) diprediksikan akan meningkat sekitar 2% pada 2025. Hal ini disebabkan karena perdagangann akan memungkinkan negara-negara mengalokasikan sumber daya secara efisien dengan menggunakan skema keuntungan komparatif. Semisal industri auto Jepang akan mendapatkan nilai tambah sekitar USD 21.5 milyar dan mendorong percepatan sekitar 24% nilai ekspor dengan angka 500 juta unit pada ekspor di tahun 2015 (Kwoon, 2018).

b.) *strategis*, CPTPP digunakan sebagai instrumen politik luar negeri Jepang untuk melakukan penyeimbangan terhadap pengaruh Tiongkok di kawasan. Seperti yang diketahui bahwa Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir meluncurkan mega proyek “*One Belt One Road*” (OBOR) dimana menghubungkan benua-benua di dunia, termasuk Asia, Afrika dan Eropa. Langkah tersebut di ikuti dengan adanya pemberian kredit dan penanaman modal di negara-negara yang sepakat dengan proyek *One Belt One Road*. Jepang tentu saja melihat hal ini sebagai sebuah ancaman. Oleh karena itu sejak masa Perdana Menteri Noda, rencana bergabungnya Jepang ditujukan untuk dua dimensi, yaitu memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan sebagai respon terhadap meluasnya pengaruh Tiongkok di kawasan (Sakuyama, 2015, p. 192).

Disamping kepentingan, juga terdapat pertarungan dan kekuatan, dalam hal ini *Chiefs, Staffs* dan *Indians* sebagai satu garis kordinasi mempertaruhkan beberapa hal. Diantaranya rentan diserang oleh kelompok oposisi baik partai Demokrat (DP) maupun partai Demokratik Konstitusional Jepang (CDP) di palemen. Serangan terhadap koalisi LDP terkait TPP pernah dilakukan oleh Partai Demokrat (DP) pimpinan Muratha Renho dalam parlemen Jepang. Dimana melakukan protes pada pembahasan TPP, juga mengajukan mosi tidak percaya terhadap menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan “Yamamoto Yuji” (McClean, 2016). Disamping itu apabila terdapat beberapa kelompok yang tidak berpuas hati seperti partai CDC yang menyuarakan kepentingan kelompok petani, juga mungkin akan berdampak pada sisi elektoral LDP. Meskipun demikian, pemerintahan koalisi LDP-Komeito dibawah Shinzo Abe masih memiliki kekuatan yang besar di parlemen dengan memegang kursi mayoritas “232 kursi” berbanding dengan oposisi yang hanya menduduki “133” kursi dalam parlemen. Dengan memegang suara mayoritas maka akan mudah bagi koalisi pimpinan LDP untuk meloloskan sebuah rancangan undang-undang.

Kedua, Sementara itu terdapat kepentingan, pertarungan dan kekuatan bagi kelompok kepentingan yaitu pebisnis. Kelompok-kelompok kepentingan memaksimalkan kepentingan sesuai dengan bisnis yang mereka kerjakan. Diantara beberapa kelompok kepentingan yang terlibat adalah *Keidanren* yang menilai akan mendapat keuntungan besar dari mekanisme perdagangan yang disepakati dalam CPTPP. Nilai ekspor pertumbuhan ekonomi Jepang meningkat 2.7%, serta ekspor akan bertambah sekitar USD 23.2 milyar, dimana mayoritas nilai ekspor dalam bidang industri yang mana sektor yang dikuasai Keindanren

(Keindanren, 2017). Adanya keuntungan besar tentu berdampak pada donasi yang diberikan pada partai berkuasa.

Secara historis Keindanren merupakan salah satu donor terbesar bagi partai Liberal Demokratik (LDP). Keindanren memberikan donor kepada partai Liberal Demokratik (LDP) selama 38 tahun, sampai akhirnya berhenti pada tahun 1994, setahun paska kekalahan partai Liberal Demokratik (LDP) pada pemilihan umum. Namun sejak partai Liberal Demokratik (LDP) berkuasa kembali maka Keindanren kembali memberikan donasi (Nakamura, 2003). Sampai pada tahun 2018, Keindanren juga memiliki pengaruh yang besar terhadap partai Liberal Demokratik (LDP) pimpinan Shinzo Abe. Pengaruh tersebut juga digunakan untuk memberikan beberapa pengaruh dalam pembuatan kebijakan (Asashi Shimbun, 2018). Dengan adanya hubungan finansial ini maka Keindanren memiliki kekuatan yang cukup kuat dalam mempengaruhi keputusan pemerintah.

Disamping Keindanren terdapat kelompok lain yang menilai CPTPP akan berdampak positif bagi tumbuhnya bisnis mereka. Sementara itu *Nokyo* atau asosiasi pertanian Jepang mengkritik tidak setuju dengan negosiasi TPP, karena dianggap dapat mengancam sektor pertanian Jepang. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk menolak liberalisasi di lima bidang yaitu; beras, gandum, daging sapi, produk susu dan gula. *Nokyo* bersikukuh agar kelima komoditas tersebut diperjuangkan dalam negosiasi TPP. Apabila tidak terdapat regulasi yang mengatur maka akan merugikan dalam sektor tersebut seperti daging sapi 31% dengan nilai USD 1 milyar per tahun, beras meningkat 111%, daging babi 3% (Korves, 2014). (Davis, Japan: Interest Group Politics, Foreign Policy Linkages,, 2017, p. 18). Masuknya jumlah impor yang sangat besar tentu berdampak pada

produk lokal pertanian Jepang. Sementara itu asosiasi produsen mobil dan alat teknologi diuntungkan dalam hal ini dan setuju dengan negosiasi lanjutan TPP.

Dengan adanya dua kepentingan berbeda dalam “*kelompok kepentingan*” maka juga dapat diketahui bahwa terdapat kelompok yang mendukung maupun menolak negosiasi lanjutan TPP paska keluarnya Jepang. Meskipun demikian terdapat dua pertarungan yang dapat terjadi baik kepada kelompok yang menolak maupun mendukung. Bagi kelompok mendukung tentu memiliki kerugian/pertaruhan yang dapat diminimalisir, hal ini diketahui bahwa kemungkinan besar negosiasi dan ratifikasi tetap dilanjutkan mengingat besarnya suara koalisi pimpinan Shinzo Abe di parlemen. Sementara itu pertarungan bagi kelompok yang menolak tentu dapat merusak hubungan baik dengan partai berkuasa. Dengan demikian dapat membuka celah suara kelompok kepentingan seperti *Nokyo* tidak diakomodasi oleh pemerintah. Disamping pertarungan, kekuatan yang dimiliki oleh kelompok kepentingan cukup beragam, seperti *Keindanren* yang merupakan donor bagi partai berkuasa LDP. Sehingga kepentingan juga perlu diakomodasi pemerintah. Kelompok pertanian *Nokyo* juga memiliki pengaruh yang cukup besar, mengingat kelompok ini merupakan basis dari pemilih kalangan petani, yang juga merupakan segemen penting bagi LDP.

3.1.4 Masalah-masalah

Masalah-masalah strategis yang dihadapi tidak hanya diselesaikan dengan pertimbangan dengan masalah itu sendiri. Melainkan juga dipengaruhi oleh adanya “*deadline, events, demands decision of busy players*”. Dengan demikian pemain-pemain diharuskan mengambil keputusan yang cepat. (Allison, 1969).

Adapun masalah-masalah yang mendorong adanya pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. *Pertama*, dalam penelitian ini, *Chief, Staffers, Indians* dibawah pimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe dihadapkan pada masalah bahwa isu perundingan Trans-Pacific Partnership telah dirundingkan dalam waktu yang lama. Diketahui bahwa perundingan mengenai TPP-12 telah dimulai sejak tahun 2013 hingga 2017. Durasi negosiasi yang cukup lama selain menguras energi baik dalam domestik Jepang maupun internasional, juga dibutuhkan agar segera diselesaikan dengan cepat guna mendorong perbaikan ekonomi Jepang yang mengalami kemunduran. Peforma “*Abenomics*” yang dinilai kurang efektif juga berpengaruh pada elektoral LDP, diamana penerimaan terhadap kepemimpinan LDP hanya sebesar 35% pada 2017 (Japan Times, 2017). Angka tersebut apabila tidak ditanggapi dengan serius maka dapat berpotensi mengganggu suara koalisi LDP-Komeito pada pemilihan umum selanjutnya. Dengan demikian masalah yang dihadapi yaitu perekonomian Jepang yang dinilai melambat dan sisi elektoral LDP.

Kedua, masalah perkembangan pengaruh Tiongkok yang semakin meluas melalui program “One Belt One Road” di kawasan tentu mengkhawatirkan Jepang yang juga sebagai salah satu negara “*middle-power*” di Asia Pasifik. Seiring dengan adanya hal tersebut maka mendorong Jepang untuk cepat dalam melakukan tindakan aktif dalam negosiasi TPP paska keluarnya Amerika Serikat. *Ketiga*, disamping itu kelompok kepentingan seperti *Keindanren* menghadapi masalah yaitu, apabila tidak dilanjutkan TPP maka akan menghambat perluasan bisnis perusahaan-perusahaan Jepang. Dengan demikian maka akan merugikan perekonomian Jepang terutama yang bekerja dalam sektor industri.

3.1.5 Saluran Tindakan

Proses terciptanya sebuah keputusan tidak datang secara tiba-tiba melainkan melalui aksi tindakan (*action-channels*). Saluran tindakan mengatur cara untuk mencapai suatu tindakan terkait dengan isu yang terkait. Dalam hal ini juga menyaring pemain-pemain utama, menentukan alasan untuk ikut dalam permainan dan mendistribusikan keuntungan dan kerugian bagi setiap permainan. Terdapat proses konsultasi antara *Indians* terhadap *Chief*, *Staff* serta *Kelompok Kepentingan* terhadap *Chief* dan *Staff* sebelum memutuskan sesuatu (Allison, 1969).

Pertama, dalam hal ini merupakan konsultasi *Chief*, *Staff* dengan *Indians*. Dalam hal ini konsultasi dapat dilihat dengan Kazuyoshi Umemoto (ketua negosiator TPP) sebagai *Indians* terhadap Shinzo Abe sebagai *Chief*. Pada 2017 paska keluarnya Amerika Serikat, Kayuzuyoshi mengadakan konsultasi terhadap Shinzo Abe, dimana dalam laporan itu menyatakan bahwa tanpa Amerika Serikat, TPP-11 akan tetap mencapai tujuan bersama. Hal ini mengindikasikan bahwa Jepang tetap ingin bertahan dalam negosiasi TPP (Motoko, 2017). Selain dalam parlemen Jepang, anggota-anggota oposisi juga mendorong adanya perlindungan terhadap produk pertanian. Dengan demikian pemerintah bersama oposisi dalam parlemen menyetujui bersama legislasi perlindungan produk pertanian, hal ini untuk mengantisipasi arus bebas dalam TPP (Japan Times, 2018).

Kedua, dalam hal ini terdapat konsultasi antara *Chiefs* diantaranya Perdana Menteri Shinzo Abe dan menteri-menterinya dengan kelompok kepentingan. Beberapa konsultasi dilakukan seperti yang terjadi pada 23 Oktober 2017, antara Perdana Menteri Jepang dan organisasi ekonomi. Pada pertemuan ini

Organisasi Ekonomi memberikan proposal dalam negosiasi TPP (Kantei.go.id, 2017). Disamping itu *Keindanren* sebagai asosiasi pengusaha Jepang yang mendorong Jepang untuk tetap bertahan dalam negosiasi TPP paska keluarnya Amerika Serikat juga mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Abe Shinzo Abe pada 2018. Bahkan ketua Keindanren yaitu Sadayuki Sakakibara menekan Perdana Menteri Shinzo Abe secara personal agar merealisasikan TPP (George, 2017). Dalam pertemuan tersebut Perdana Menteri Shinzo Abe menekankan pada komitmen Jepang terhadap CPTPP (Kantei.go.id, 2018).

3.1.6 Tindakan sebagai Politik

Keputusan pemerintah diputuskan melalui mekanisme politik “*Rather the context of shared power but separate judgments concerning important choices, determines that politics is the mechanism of choice*” (Allison, 1969). Sikap Jepang mengambil keputusan untuk bertahan dan menjadi aktif dalam mendorong negosiasi dalam CPTPP merupakan hasil dari pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Pertama, prioritas dan kepentingan. Dalam pembahasan sebelumnya diketahui bahwa terdapat prioritas, kepentingan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Jepang. Diantaranya mundurnya perekonomian Jepang, dan menguatnya pengaruh Tiongkok di kawasan. Sehingga dengan melanjutkan negosiasi TPP, maka diharapkan dapat menguatkan kembali posisi Jepang dalam bidang tersebut. *Kedua*, kecilnya resistensi dari kelompok kepentingan. Sementara itu, hanya terdapat pihak yang sedikit dalam berseberangan, yaitu kelompok oposisi seperti partai Demokrat dan Partai Demokratik Konstitusional Jepang,

serta kelompok kepentingan seperti Nokyo. Namun dari pertimbangan prioritas, kepentingan serta urgensi dari masalah yang dihadapi hanya dirasakan oleh segelintir pihak seperti misalnya *Nokyo* yang khawatir akan produk pertaniannya terancam. Sementara itu di sisi lain terdapat prioritas, kepentingan serta urgensi masalah yang lebih penting, yaitu yang telah dijelaskan sebelumnya berupa pertimbangan strategis keamanan kawaan dan kondisi ekonomi nasional. Maka dipilihlah melanjutkan TPP-11 sebagai upaya untuk memperbaiki ekonomi, menyeimbangi pengaruh Tiongkok di kawasan dan mempengaruhi efek elektoral pada partai koalisi. Meskipun demikian kepentingan kelompok pertanian tetap diakomodasi oleh Jepang. Bahkan Perdana Menteri Shinzo Abe berjanji untuk melindungi sektor pertanian, terutama kelima bahan yaitu beras, gandum, daging sapi, produk susu dan gula. Hal ini mempertegas komitmen serupa yang dibuat oleh Shinzo Abe pada tahun 2013, mengenai perlindungan terhadap sektor pertanian dalam negosiasi TPP (Euro2Day, 2013).

3.1.7 Hasil (*Streams of Outcome*)

Keputusan atau tindakan penting pemerintah muncul sebagai kolase yang terdiri dari tindakan individu, hasil pertandingan kecil dan utama, dan pelanggaran. Hasil yang tidak pernah dapat dipilih oleh aktor dan tidak akan pernah muncul dari tawar-menawar dalam satu pertandingan atas masalah ini dibuat sepotong demi sepotong (Allison, 1969). Keputusan Jepang untuk tetap bertahan dalam TPP paska keluarnya Amerika Serikat merupakan hasil perundingan, pertimbangan baik dari pihak *Chief, Staffers, Indians* dan *kelompok kepentingan*. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa *Chief, Staff dan Indians* memiliki

garis kordinasi yang sama, hal ini mengingat sistem politik Jepang yang bersifat sentralistik.

Dengan demikian prioritas, kepentingan, serta masalah-masalah yang dihadapi oleh ketiga pemain tersebut sama. Dimana menempatkan prioritas strategis dan ekonomi ditengah kemunduran ekonomi dan meluasnya pengaruh Tiongkok di kawasan sebagai hal yang perlu ditanggulani terlebih dahulu. Peran Perdana Menteri Shinzo Abe sebagai ketua koalisi partai Demokratik Liberal (LDP)-*Komeito* dan sebagai seorang kepala pemerintahan Jepang (Perdana Menteri) sangat terlihat dengan jelas. Sementara itu kecilnya pihak disebabkan karena prioritas, kepentingan dan masalah-masalah serta kekuatan mereka tidak lebih mendesak dan kuat seperti halnya *Chiefs, Staffs* dan *Indians*.

3.2 Analisis Model Birokratik

Terdapat tiga komponen dalam analisis model birokratik. Tiga komponen tersebut adalah aksi dan niatan, posisi pemain (*where you stand depend on where you sit*), *Chief* dan *Indians*. Dalam hal ini juga ditambahkan kelompok kepentingan dalam komponen ketiga yaitu *Chief* dan *Indians*, mengingat perbedaan politik Jepang dengan Amerika Serikat yang dijadikan studi kasus dalam tulisan Graham T. Alisson.

3.2.1 Aksi dan Niatan

Aksi atau tindakan tidak selalu didahului dengan niatan (*intended goals*), melainkan merupakan gabungan dari beberapa niatan pemain-pemain yang kemudian menghasilkan *outcome* (Allison, 1969).

Dalam keputusan Jepang untuk bertahan dalam CPTPP maka juga bukan merupakan niatan yang dibuat oleh satu pihak saja. Melainkan terdiri dari banyak perspektif dari pemain-pemain atau pengambil kebijakan yang terlibat. Dalam hal ini terdapat dua niatan pemain yang terlibat, *Pertama*, dalam pembahasan sebelumnya diketahui bahwa *Chiefs*, *Staff* dan *Indians* memiliki satu garis koordinasi. Hal ini sebagai konsekuensi dari sistem politik Jepang yang bersifat sentralistik. Disamping itu keterlibatan aktif Shinzo Abe (*Chief*) secara pribadi dari awal perundingan hingga paska keluarnya Amerika Serikat dari TPP membuat suara-suara dari *Staff* dan *Indians* tidak terdengar dan hanya mengikuti arahan dari *Chiefs* Perdana Menteri. Dengan posisi demikian maka ketiganya memiliki niat tunggal. Niat pemain-pemain ini adalah didasarkan pada prioritas persepsi isu, kepentingan pertarungan dan kekuatan serta masalah-masalah. Dimana dari ketiga hal tersebut muncul sebuah isu bersama yaitu memperbaiki perekonomian, keinginan untuk memperkuat aliansi kawasan serta efek elektoral pada pemilihan selanjutnya.

Dalam hal ini juga perlu diketahui bahwa sistem politik Jepang bersifat sentralistik yang terlalu condong pada suatu kepemimpinan. Sehingga tidak terdapat dialektika yang beragam sebagai pendorong terciptanya kebijakan. Figur Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang memiliki pengaruh besar dalam menentukan sikap ini. Hal ini didasari pada pertimbangan ekonomi domestik dan juga pertimbangan strategis kawasan untuk mengimbangi Tiongkok di kawasan.

Kedua, Disamping itu, keputusan Jepang untuk tetap bertahan dalam negosiasi CPTPP merupakan juga hasil kemauan dari kelompok bisnis yaitu Keidanren. Diketahui sebelumnya bahwa pelaku bisnis seperti Keidanren yang

merupakan donor bagi Partai Liberal Demokratik (LDP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Sementara itu ketua Keindanren dari awal bergabungnya Jepang dalam TPP sampai paska keluarnya Amerika Serikat dari TPP masih menunjukkan pandangan yang positif. Menilai bahwa perjanjian perdagangan bebas tersebut akan memberikan keuntungan bagi perekonomian Jepang, utamanya sektor ekspor industri dan teknologi. Dengan adanya pengaruh ini maka *outcome* yang dihasilkan menghasilkan sikap Jepang yang bertahan dalam CPTPP.

Dari dua penjelasan diatas, dapat ditarik garis besar bahwa niatan Jepang untuk mempertahankan negosiasi TPP paska keluarnya Amerika Serikat tidak dihasilkan melalui niatan satu tunggal pemain. Namun hal tersebut juga dihasilkan dari dialektika dari dua pemain besar, yaitu *Pertama, Chieffs, Staffs, Indians* dan *kedua, kelompok kepentingan Keindanren*. Pihak pertama menyetujui adanya keberlangsungan negosiasi TPP karena keinginan untuk memperkuat posisi strategis keamanan Jepang di kawasan dan perbaikan ekonomi Jepang. Sementara pihak kedua menyetujui adanya keberlanjutan negosiasi karena dengan bergabungnya Jepang dalam TPP maka akan menguntungkan bisnis yang mereka jalankan. Dengan demikian niatan Jepang dalam mempertahankan negosiasi TPP dihasilkan oleh gabungan dari dua niatan tersebut.

3.2.2 Posisi (*where you stand depend on where you sit*)

Posisi pemain menentukan niatan dan sikap yang diambil. Sehingga sikap yang diambil dari pemain-pemain merupakan refleksi dari posisi yang sedang dia jabat. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa sikap dari pemain yang berkontribusi

besar dalam penentuan Jepang bertahan dalam CPTPP adalah Perdana Menteri Shinzo Abe.

Pertama, posisi luar negeri (Sebagai Perdana Menteri). Sikap Perdana Menteri Shinzo Abe yang tetap memutuskan untuk bertahan dalam CPTPP meskipun sebelumnya mengeluarkan pernyataan bahwa TPP tanpa keterlibatan Amerika Serikat membuat perjanjian tersebut tidak berguna (Suastha, 2016). Dengan sikap yang demikian, Perdana Menteri Shinzo Abe berusaha secara maksimal dalam melakukan lobi agar Amerika Serikat tidak keluar dari TPP. Meskipun usaha Perdana Menteri Shinzo Abe sia-sia karena pada akhirnya Amerika Serikat memutuskan untuk keluar TPP.

Kebijakan Jepang dibawah Shinzo Abe untuk mempertahankan negosiasi TPP bukan tanpa resiko. Terdapat hal yang dipertaruhkan, yaitu kemungkinan besar mendapat serangan, kritik bahkan mosi tidak percaya dari pihak oposisi. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh oposisi dari partai Demokrat (DP) dalam mengusung mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertanian Jepang atas komentarnya yang terkait TPP. Disamping itu juga Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri menghadapi tentangan keras dari kalangan petani termasuk *Nokyo* yang mana merupakan segmen signifikan dari pemilih di Jepang. Kehilangan suara petani di Jepang memberikan dampak elektoral yang signifikan bagi partai Liberal Demokratik (LDP) mengingat “*approval rating*” bagi Shinzo Abe hanya berkisar 34.8%. Sehingga memaksa partai Liberal Demokratik (LDP) dibawah Shinzo Abe untuk melakukan kompromi terhadap semua segmen pemilih. Meskipun demikian, resiko-resiko tersebut dapat ditanggapi dengan kekuatan yang dimiliki oleh Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri dan pemimpin partai Liberal

Demokratik (LDP). Hal ini disebabkan karena Shinzo Abe dan partai koalisinya menduduki suara mayoritas dalam parlemen. Sehingga upaya legal yang dilakukan oleh koalisi oposisi tidak akan berpengaruh signifikan. Sementara itu dengan posisi yang kuat, maka membuat Shinzo Abe dengan mudah melakukan kompromi dengan kelompok petani dan asosiasnnya “*Nokyo*”. Disamping itu Jepang dibawah Shinzo Abe juga memiliki kekuatan lain yaitu sebagai negara dengan ekonomi terbesar pertama dalam TPP paska keluarnya Amerika Serikat. Hal ini membuat posisi tawar Jepang meningkat dalam perjanjian dagang tersebut. Dengan demikian maka Jepang memiliki pengaruh yang besar.

Disamping itu sikap Perdana Menteri Shinzo Abe yang demikian dipengaruhi oleh posisi yang dijabat, yaitu sebagai Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe harus mampu membuat kebijakan strategis yang mampu memaksimalkan kepentingan nasional dan kawasan Jepang. Dalam hal ini Shinzo Abe tahu bahwa Tiongkok tengah melakukan ekspansi pengaruh secara besar-besaran di kawasan Asia-Pasifik. Sehingga mempertahankan CPTPP merupakan kebijakan yang dianggap tepat, karena juga merupakan perjanjian dagang terbesar di dunia.

Posisi sebagai Perdana Menteri juga memberikan Shinzo Abe kesempatan untuk melakukan konsultasi bersama pemain-pemain lain. Dalam hal ini disebut sebagai saluran tindakan. Dalam saluran Tindakan menunjukkan bahwa terdapat konsultasi antara *Chieffs, Staffs, Indians* dan Kelompok kepentingan. Seperti Shinzo Abe yang menerima proposal dari organisasi ekonomi Jepang. Dari konsultasi juga kemudian dipertimbangkan mengenai kepentingan dan prioritas yang harus diutamakan. Dari hal tersebut kemudian

muncul bahwa meningkatnya pengaruh Tiongkok serta perbaikan ekonomi Jepang merupakan prioritas dan kepentingan utama dibanding mendahulukan kelompok yang menentang seperti asosiasi pertanian Jepang “*Nokyo*”. Hal ini kemudian disebut sebagai *Tindakan sebagai politik*, atau pertimbangan politik.

Kedua, posisi dalam negeri (Sebagai Presiden LDP) sikap Shinzo Abe juga dipengaruhi dari posisinya sebagai pemimpin Partai Liberal Demokratik (LDP) Jepang. Dimana salah satu pendorongnya yaitu Keindanren dan sejumlah pelaku bisnis Jepang menginginkan tetap bertahan dalam CPTPP. Suara dari Keindanren tentu sangat diperhatikan oleh Shinzo Abe sebagai seorang presiden Partai LDP. Hal ini didasarkan pada hubungan politik antara kedua entitas. Seperti diketahui dalam pembahasan sebelumnya bahwa Keindanren merupakan salah satu donor terbesar bagi partai Liberal Demokratik (LDP), dimana telah menjadi donor tetap selama 38 tahun sampai akhirnya berhenti pada tahun 1994. Meskipun demikian ketika partai Liberal Demokratik berkuasa kembali, maka Keindanren kembali menjadi donor tetap dengan angka sumbangan yang besar. Sementara itu posisi Keindanren yang juga penting dalam mendorong kebijakan tentu menginginkan keuntungan bisnis. Sehingga pada akhirnya mendorong pemerintah Jepang untuk tetap bertahan dalam CPTPP. Dengan kekuatan ini maka tentu suara, prioritas dan kepentingan Keindanren diperhatikan oleh Shinzo Abe sebagai presiden partai LDP.

Dengan adanya hubungan patron yang erat diantara Keindanren dan partai LDP maka membuat posisi Keindanren sangat kuat. Sehingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Mengabaikan suara Keindanren tentu akan berdampak pada donor yang di dapatkan oleh partai LDP. Disamping itu

tidak ada alasan untuk tidak mengakomodasi suara Keindanren, hal ini karena tidak adanya perbedaan posisi, justru adanya persamaan kepentingan, prioritas antara Keindanren dan *Chieffs*, *Staffs* dan *Indians* yang bekerja dalam struktur eksekutif Shinzo Abe, telah membuat lancarnya lobi yang terjadi. Sekali lagi, mengabaikan Keindanren akan mempengaruhi pendapatan partai, berkurangnya pendapatan sedikit besarnya akan berdampak pada performa partai dalam memenangkan pemilihan umum pada periode berikutnya.

3.2.3 Chief, Indians serta Kelompok Kepentingan

Dalam hal ini terdapat hubungan vertikal antara *Chief* dan *Indians* dalam menentukan sebuah kebijakan. Hal ini disebabkan *Chief* yaitu Perdana Menteri atau kepala pemerintahan lain kerap sibuk dengan jadwal yang padat. Sehingga *Indians* seperti duta perwakilan negara mewakili kepentingan *Chief*. Dengan demikian yang lebih banyak memikirkan mengenai sebuah keputusan adalah *Indians* atau duta perwakilan atau diplomat bukan *Chief* (Allison, 1969).

Dalam penelitian ini terdapat empat jenis pemain yang terlibat yaitu *Chieffs* (lihat tabel 3.1) adalah *Shinzo Abe*, *Taro Aso*, *Taro Kono*, *Hiroshigei Shiko*, *Yoshihide Yuga*, *Toshimitsu Motegi*. *Staffs* adalah *Yamagami Shingo*, *Okochi Akhihiro*, *Katahira Satoshi*, *Nanazawa Jun* (lihat tabel 3.2). *Indians* adalah *Takehiro Kagawa*, *Kazuyoshi Umemoto* (lihat tabel 3.3). *Kelompok Kepentingan* adalah *Keindanren*, *Nokyo* dan asosiasi lain (lihat tabel 3.4). Meskipun demikian, pada kasus keputusan Jepang dalam bertahan pada *Comprehensive and Progressive for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP), maka yang berpengaruh besar adalah bukan merupakan *Indians* melainkan *Chief* sendiri

yaitu Perdana Menteri Shinzo Abe. Hal ini dilandasi dari partisipasi personal Shinzo Abe dalam mempertahankan negosiasi ini. Diantara beberapa diplomasi yang dilakukan secara personal oleh Perdana Menteri Shinzo Abe adalah dengan mengunjungi calon presiden terpilih Donald Trump pada 2016 di Trump Tower, Amerika Serikat. Abe berupaya untuk membujuk Donald Trump agar mengurungkan niatnya untuk memimpin Amerika Serikat keluar dari TPP. Ketika Trump telah menjabat sebagai Presiden dan Amerika telah keluar dari TPP, Perdana Menteri Shinzo Abe juga tetap mencoba hal serupa. Diplomasi tingkat tinggi yang melibatkan Perdana Menteri sebagai *diplomat* menandakan pentingnya perjanjian ini bagi Jepang dan Shinzo Abe. Keputusan ini penting bagi Perdana Menteri Shinzo Abe mengingat hal tersebut sangat penting bagi kondisi ekonomi dan kebijakan strategis Jepang dan bagi Partai LDP. Dengan demikian maka pemain yang berpengaruh besar adalah Perdana Menteri Shinzo Abe. Sehingga tidak terdapat pengaruh yang besar dari *Staffs* maupun *Indians* dalam penentuan keputusan ini. Hal ini mengindikasikan juga tidak adanya dinamika dalam pengambilan keputusan, karena dominasi dari *Chieff* yaitu Perdana Menteri Shinzo Abe.